



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**


Nomor: HKI.5-HH.05.05-1011

Nomor: 120.23/62/LITBANG/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Daulat P. Silitonga, S.H., M.Hum. : Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK I;
2. Ir. Mulyadi Wowor, M.Si. : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku Utara, beralamat di Jalan Gosale Puncak Kantor Gubernur Maluku Utara Lantai IV di Sofifi selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II:

1. Bahwa PIHAK I adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa PIHAK II adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang salah satu tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyusunan Kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Provinsi Maluku Utara dan selanjutnya menerima pendelegasian sebagian urusan pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program PIHAK I dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan PIHAK II, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK II dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PIHAK II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara PARA PIHAK di bidang perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- (1) Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan Intelektual.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual.
- (3) Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual.
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I

(1) PIHAK I mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) PIHAK II dengan menyelenggarakan kegiatan antara lain: sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. Menyediakan fasilitasi akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi Kekayaan Intelektual; dan
- d. Memberikan informasi dan pendampingan proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

(2) PIHAK I mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dari PIHAK II terkait jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari hasil penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan;
- b. Mendapatkan informasi mengenai hasil identifikasi teknologi dan komersialisasi hasil penelitian yang berbasis Paten atau Kekayaan Intelektual lainnya; dan
- c. Mendapatkan laporan kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual di lingkungan PIHAK II untuk masyarakat dan pejabat daerah.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

(1) PIHAK II mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan data dan informasi dari PIHAK II terkait jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari hasil penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan;
- b. Memberikan informasi mengenai hasil identifikasi teknologi dan komersialisasi hasil penelitian yang berbasis Paten atau Kekayaan Intelektual lainnya; dan
- c. Memberikan laporan kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual di lingkungan PIHAK II untuk masyarakat dan pejabat daerah.

(2) PIHAK II mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) PIHAK II dengan menyelenggarakan kegiatan antara lain: sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. Mendapatkan fasilitasi akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi Kekayaan Intelektual; dan

- d. Mendapatkan informasi dan pendampingan proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan membuat rencana kerja yang dituangkan dalam rencana anggaran dan belanja masing-masing PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk Satuan Kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Yang termasuk force majeure antara lain adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui email, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

A. Untuk PIHAK I

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Up. Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp : (021) 5790-5517

E-mail : tu.ditksp@gmail.com

B. Untuk PIHAK II

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku Utara

Alamat : Jalan Gosale Puncak Kantor Gubernur Maluku Utara Lantai IV di
Sofifi, PROVINSI MALUKU UTARA
Telp : 0813 4084 7567
E-mail : balitbangdamalut@gmail.com

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuhi cap instansi, dan masing-masing PIHAK memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.



PIHAK I

Daulat P. Silitonga, S.H., M.Hum.



PIHAK II

Ir. Mulyadi Wowor, M.Si.